

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
NELAYAN DI DESA PAJUKUKANG, KECAMATAN BONTOA,  
KABUPATEN MAROS**

**SKRIPSI**

**ANNISA DWI RAHAMALIA**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
DEPARTEMEN PERIKANAN  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
NELAYAN DI DESA PAJUKUKANG, KECAMATAN BONTOA,  
KABUPATEN MAROS**

**ANNISA DWI RAHMALIA  
L041 19 1044**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
DEPARTEMEN PERIKANAN  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pajukukang,  
Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ANNISA DWI RAHMALIA**

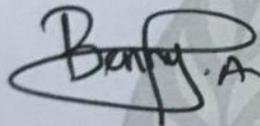
**L041 19 1044**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin pada tanggal 17 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

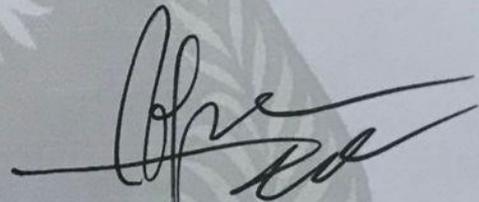
**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Benny Audy Jaya Gosari, S.Kel., M.Si**  
NIP. 197808192008120101



**Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si**  
NIP. 197110122002121001

*20 Maret 2023*

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi  
Agrobisnis Perikanan**



**Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi., M.Si**  
NIP. 1972926 200604 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Dwi Rahmalia  
NIM : L041 19 1044  
Program Studi : Agrobisnis Perikanan  
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai kebutuhan peraturan perundangan-undangan (Permendiknas No. 17 Tahun 2007).

Makassar,

Penulis



Annisa Dwi Rahmalia

NIM. L041 19 1044

## ABSTRAK

**Annisa Dwi Rahmalia** L041 19 1044. “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros” dibimbing oleh **Benny Audy Jaya Gosari** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Adri Arief** sebagai Pembimbing Anggota.

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2022 – Januari 2023 pada masyarakat nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dan Dinas Perikanan Kab. Maros. Metode penentuan lokasi yaitu secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan yaitu wilayah tersebut mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dalam bidang perikanan (nelayan) sehingga Desa Pajukukang memerlukan peran pemerintah dalam memberdayakan nelayannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode penentuan sampel *purposive sampling*. Teknik pengambilan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan teori Miles and Huberman. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kab. Maros sebagai regulator dalam pemberdayaan nelayan mengacu pada Undang-undang yang bersifat nasional yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dinas Perikanan juga berperan menyosialisasikan aturan-aturan sesuai dengan acuan KKP. Dinas Perikanan Kab. Maros sebagai dinamisator berperan dalam melaksanakan BIMTEK serta pembentukan dan pembinaan kelompok nelayan sebagai upaya menggerakkan partisipasi masyarakat nelayan. Pemerintah sebagai fasilitator berperan memfasilitasi tenaga penyuluh dengan pemberian informasi dan pendampingan. Selain itu, Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa alat tangkap untuk nelayan dengan tujuan meningkatkan kapasitasnya.

**Kata Kunci** : Dinas Perikanan, peran pemerintah, pemberdayaan, nelayan

## ABSTRACT

**Annisa Dwi Rahmalia** L041 19 1044. "The Government's Role in Empowering Fishermen Communities in Pajukukang Village, Bontoa District, Maros Regency" under the guidance of **Benny Audy Jaya Gosari** as Main Supervisor and **Andi Adri Arief** as Member Supervisor.

---

---

This study aims to determine the role of government as a regulator, administrator, and facilitator in empowering fishing communities in Pajukukang Village, Bontoa District, Maros Regency. The research was conducted in December 2022 - January 2023 in fishing communities in Pajukukang Village, Bontoa District, Maros Regency and the District Fisheries Service. Maros. The location determination method is purposive with the consideration that the majority of the population in this area depend on fisheries (fishermen) so that Pajukukang Village needs the government's role in empowering its fishermen. The type of research used is descriptive qualitative with purposive sampling method. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation with data analysis using the theory of Miles and Huberman. The results of this study indicate that the District Fisheries Service. Maros as a regulator in empowering fishermen refers to a national law, namely Law No. 7 of 2016 concerning the protection and empowerment of fishermen. The Department of Fisheries also plays a role in disseminating the regulations in accordance with the KKP guidelines. District Fisheries Service Maros as a dynamist plays a role in implementing BIMTEK and forming and fostering fishermen groups as an effort to mobilize the participation of fishing communities. The government as a facilitator plays a role in facilitating extension workers by providing information and assistance. In addition, the Fisheries Service also provides assistance in the form of fishing gear for fishermen with the aim of increasing their capacity.

**Keywords:** Department of Fisheries, the role of government, empowerment, fishermen

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., pemilik segala kesempurnaan, memiliki segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas, yang telah memberikan kami kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan karunia selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam turunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW., Nabi pembawa cahaya ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga kita merasakan nikmatnya hidup zaman ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai ***Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros*** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Pada penelitian ini, hambatan dan rintangan yang dihadapi merupakan proses yang menjadi kesan dan pendewasaan diri. Semua ini tentunya tidak lepas dengan adanya kemauan yang kuat dalam hati dan kedekatan kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta ayah **Lukman Daris** & ibu **Irnawati** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang serta tak pernah berhenti memberi semangat dan memanjatkan doa terbaik untuk penulis.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis hantarkan kepada Bapak **Benny Audy Jaya Gosari, S.Kel., M.Si** selaku penasehat akademik, pembimbing ketua dan juga telah menjadi orang tua dalam memberikan nasihat, arahan, dukungan, dan memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pula kepada Bapak **Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si** yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Safruddin, S.Pi., M.Si., Ph.D** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
2. **Ibu Dr. Ir. Siti Aslamyah, MP** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.

3. **Bapak Dr. Ahmad Faizal, ST., M.Si** selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Dr. Fahrul, S.Pi., M.Si** selaku Ketua Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
5. **Ibu Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi, M.Si** selaku Ketua Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
6. Ibu **Prof. Dr. Ir. Mardiana Ethrawaty Fachry, M.S & Bapak Dr. Abd. Wahid, S.Pi., M.Si** selaku penguji yang telah memberikan pengetahuan baru dan masukan saran serta kritik yang sangat membangun.
7. **Dosen dan Staf Dosen** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
8. **Seluruh Staf Administrasi FIKP** yang selalu membantu dalam urusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
9. **Kepala & seluruh staff Dinas Perikanan Kab. Maros dan Kantor Desa Pajukukang** yang membantu dalam urusan pengambilan data penelitian.
10. **Seluruh informan** yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data-data selama penelitian ini.

Ucapan terima kasih dan limpahan kasih sayang melalui skripsi ini penulis sampaikan kepada mereka yang telah berperan serta dalam proses penelitian penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

1. Teman-teman **AUR19A** (Agrobisnis Perikanan 2019) dan **BANDARA 2019** (Perikanan 2019) atas bantuan, semangat, kebersamaan suka cita dan pengalaman yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan.
2. **BPH HIMASEI PERIODE 2021 dan MPH KEMAPI FIKP UNHAS PERIODE 2022-2023** yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis dan membebani satu sama lain serta memberikan pengalaman yang luar biasa selama menjalankan organisasi.
3. **KKNT 108 Desa Purnakarya** yang selama kurang lebih 2 bulan bersama-sama menjalani pengabdian serta senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama menyelesaikan skripsi ini.
4. **Sri Novianti Arif, Hikmah, Sri Wulandari, Andi Sindi Aulia Ramadhani, Novi Nurika Nengsih dan Mappile** atas bantuan dan dukungan penuh yang diberikan kepada penulis semasa perkuliahan dan sebagai teman seperjuangan penulis dalam mengurus segala urus selama masa perkuliahan.

5. **Emylia Syair** sebagai teman seperjuangan yang telah kebersamai penulis dari proses mahasiswa baru hingga mengurus segala proses penyelesaian studi.
6. **Dea Nur Shabrina & Maudy Alfira Arifin** sebagai sahabat penulis yang senantiasa mendengar cerita penulis dalam keadaan apapun.

Kesempurnaan segalanya milik Allah SWT, penulis sadar dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat dan memberi nilai untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Semoga semua bantuan dan usaha dalam membantu penulis senantiasa mendapatkan balasan yang baik dan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT., *Aamiin*.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 15 Maret 2023

Penulis

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Makassar, pada tanggal 28 April 2001. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Ayah Dr. Ir. Lukman Daris, M.Si dan Ibu Hj. Irnawati. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK An-Nur pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan sekolah di SDN 10 Sanggalea Maros dan lulus di tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Unggulan Maros pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Maros pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Selama menempuh pendidikan di sekolah menengah atas penulis aktif sebagai pengurus di ekstrakurikuler bola voli dan mading. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan pada Universitas Hasanuddin Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan melalui jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan. Penulis pernah menjabat sebagai anggota Divisi Hubungan Luar KMP ABP KEMAPI FIKP UNHAS Periode 2021 dan anggota Komisi Majelis Pertimbangan Himpunan KMP ABP KEMAPI FIKP UNHAS Periode 2022-2023. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Desa Wisata Gelombang 108 di Desa Purnakarya Kab. Maros pada tahun 2022. Penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Profesi (PKP) di CV. Marine Jaya Makassar pada tahun 2022. Sebagai tugas akhir, penulis melakukan penelitian berjudul "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayah di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros".

## DAFTAR ISI

|  | Halaman     |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....               | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....           | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT</b> .....                    | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....               | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....             | <b>xv</b>   |
| <b>I. PENDAHULUAN</b> .....              | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 4           |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 4           |
| D. Kegunaan Penelitian .....             | 4           |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....        | <b>5</b>    |
| A. Definisi Peran .....                  | 5           |
| B. Indikator Peran .....                 | 6           |
| C. Pemerintah .....                      | 7           |
| D. Nelayan.....                          | 11          |
| E. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.....  | 11          |
| F. Penelitian Terdahulu .....            | 13          |
| G. Kerangka Pikir Penelitian .....       | 15          |
| <b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....  | <b>16</b>   |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian .....     | 16          |
| B. Jenis Penelitian .....                | 16          |
| C. Populasi dan Sampel .....             | 16          |
| D. Sumber Data .....                     | 17          |
| E. Teknik Pengambilan Data .....         | 17          |
| F. Teknik Analisis Data.....             | 18          |
| G. Konsep Operasional .....              | 20          |
| <b>IV. HASIL PENELITIAN</b> .....        | <b>21</b>   |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... | 21          |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Keadaan Penduduk.....   | 22        |
| C. Sarana dan Prasarana .....  | 25        |
| D. Karakteristik Informan .....  | 26        |
| E. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Maros | 27        |
| F. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan .....            | 29        |
| <b>V. PEMBAHASAN .....</b>   | <b>38</b> |
| A. Pemerintah Sebagai Regulator .....                                      | 38        |
| B. Pemerintah Sebagai Dinamisator .....                                    | 38        |
| C. Pemerintah Sebagai Fasilitator .....                                    | 41        |
| <b>VI. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>44</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 44        |
| B. Saran .....   | 44        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>45</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian ..... | 15 |
|---|----|

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Penelitian terdahulu.....   | 13 |
| Table 2. Jumlah sampel.....  | 17 |
| Tabel 3. Jumlah penduduk di Desa Pajukukang.....   | 22 |
| Tabel 4. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....  | 23 |
| Tabel 5. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan .....  | 23 |
| Tabel 6. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian .....  | 24 |
| Tabel 7. Sarana dan Prasarana .....  | 25 |
| Tabel 8. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Umur di Desa Pajukukang.....                             | 26 |
| Tabel 9. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Pajukukang.....                       | 27 |
| Tabel 10. Matriks peran pemerintah sebagai regulator .....   | 30 |
| Tabel 11. Matriks peran pemerintah sebagai dinamisator.....  | 31 |
| Tabel 12. Matriks peran pemerintah sebagai fasilitator .....   | 34 |
| Table 13. Bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan kepada nelayan di Desa Pajukukang pada tahun 2022..... | 37 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian..... | 49 |
| Lampiran 2. Data Umum Responden.....    | 50 |
| Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian..... | 53 |

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 63 persen sama dengan tiga perempat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Luas perairan tersebut, termasuk didalamnya laut, memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia. Dari gambaran tersebut menunjukkan potensi kekayaan negara Indonesia pada sektor perikanan dan kelautan yang tentu saja harus dimanfaatkan dan dikelola bersama dari semua elemen salah satunya pemerintah.

Pemerintah merupakan salah satu unsur negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan dan kelautan. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan seharusnya dapat mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, kesejahteraan tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Peran yang dilakukan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya agar masyarakat semakin mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas. Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator untuk menyiapkan arah dan menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan (Kuswandi, 2017).

Pemerintah sebagai regulator memiliki peran untuk memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dimana dalam pasal 63 yang berbunyi “ Pemerintah dan Pemerintahan Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya.

Pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah harus dapat menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan di wujudkan melalui tim penyuluh maupun untuk memberikan pembinaan. Namun, hal inipun tidak menimbulkan banyak perubahan karena minimnya penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perikanan.

Pemerintah daerah juga harus mampu menjadi fasilitator yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan. Namun, bantuan seperti permodalan dan pengadaan alat tangkap nelayan belum tersalurkan dengan baik sehingga masih banyak nelayan yang kekurangan peralatan alat tangkap ikan.

Studi tentang masyarakat nelayan sebagian besar berfokus pada aspek sosial ekonomi. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat kita yang sangat intensif didera kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan kawasan pesisir. Nelayan sering dihadapkan dengan persoalan kemiskinan, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan nelayan berdampak langsung kepada keluarga nelayan yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil perikanan (Kusnadi *et al.* 2007).

Kabupaten Maros sebagai daerah otonom di daerah pesisir yang didominasi oleh masyarakat nelayan sudah seharusnya mengatur kepentingan rumah tangganya sendiri dan mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada di wilayahnya termasuk dalam pemberdayaan nelayan. Seperti melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan

kemampuan ekonomi, sumberdaya manusia, pemberdayaan, penyediaan infrastruktur, dan pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Maros yang masyarakatnya dapat dikategorikan masyarakat miskin adalah wilayah Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Nurkse (dalam Susanto, 2019) menggambarkan dalam teori lingkaran kemiskinan bahwa keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas manusia. Rendahnya produktivitas manusia akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan yang diterima akan berakibat pada rendahnya tabungan dan rendahnya investasi. Investasi bisa berupa investasi sumber daya manusia yaitu dengan ukuran pendidikan, maupun investasi kapital dengan ukuran konsumsi. Dari teori lingkaran kemiskinan tersebut dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan besarnya konsumsi. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dan kajian mengenai sebab-sebab kemiskinan menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Berdasarkan tingkat pendapatan Desa Pajukukang merupakan salah satu desa di Kabupaten Maros dengan tingkat pendapatan nelayan yang rendah. Menurut Badan Pusat Statistik (2022) dan World Bank penduduk dapat dikatakan miskin jika pendapatan rata-ratanya sebesar 1,55 dolar AS per hari atau sama dengan Rp 24.172 (Rp 725.000 /bulan) . Berdasarkan data profil Desa Pajukukang tahun 2022 pendapatan nelayan di wilayah tersebut berfluktuasi. Umumnya pendapatan mereka berkisar antara Rp.400.000 – Rp. 1.000.000 perbulan. Pendidikan juga diakui secara luas bahwa memiliki peran sebagai pemimpin dalam instrumen pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna. Namun, berdasarkan data profil Desa Pajukukang tahun 2022 kondisi penduduk dari segi tingkat pendidikan menunjukkan jumlah penduduk yang tidak sekolah berjumlah 1.704 jiwa atau 42% dari total jiwa yang ada di Desa Pajukukang.

Berdasarkan deskripsi yang diuraikan merupakan pusaran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Pajukukang yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Hal demikian seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Maros dalam mencari solusi pemecahan masalah bagi masyarakat nelayan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang bagaimana peran pemerintah dalam melakukan

pemberdayaan kepada masyarakat nelayan, selain daripada itu peneliti juga ingin mengetahui apakah dalam melakukan pemberdayaan tersebut ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir dalam konteks ini ialah para nelayan yang ada di Desa Pajukukang. Atas dasar latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”**.

## **B. Rumusan Masalah**

**Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas untuk memberikan batasan dan pedoman arah penelitian maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :**

1. Bagaimana peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pajukukang?
2. Bagaimana peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pajukukang?
3. Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pajukukang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pajukukang
2. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pajukukang
3. Untuk mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pajukukang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsi pemikiran dalam meningkatkan peran pemerintah di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sehingga menghasilkan solusi kepada semua pihak yng terkait khususnya pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Maros.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Definisi Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran yang dimainkan seseorang dalam suatu kelompok nantinya akan membentuk suatu komponen penting dalam hal kemampuan seseorang dalam bekerja (Hurrul, 2017). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Peranan juga merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai sebab akibat (Komang, dkk. 2017). Menurut Soekanto (2002 dalam Syaron *et. al.*, 2017) peran dibagi menjadi yaitu, peran aktif, peran partisipatif, peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki 3 aspek, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

### **B. Indikator Peran**

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Imanuel, 2015) Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

1. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
2. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
3. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran 13 adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya. Lebih lanjut Soejono mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau status individu dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peran adalah seperangkat aturan yang memandu kehidupan seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah konsep perilaku yang dapat dilakukan seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang maupun sekelompok orang (organisasi) apabila melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan (Suyanto, 2013).

### **C. Pemerintah**

Definisi pemerintah yang dikutip dari Jum angraini (2012:14) pemerintah berasal dari bahasa Yunani dari kata "cratein". Dalam bahasa Inggris, istilah pemerintah disebut dengan :Government, yang berasal dari bahasa Latin: Gubernaculum yang artinya kemudi. Arti Gubernaculum ini di Indonesia diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan. Sedangkan secara etimologi pemerintahan berasal dari kata dasar "perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut government yang berasal dari bahasa Latin gubernare, Greek kybernan yang berarti mengemudi atau mengendalikan.

Menurut R. Mac Iver dalam (Nurman, 2017) pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada dimana pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. Menurut Van Poelje yang di namakan pemerintah dalam arti luas adalah fungsi yang meliputi tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah (administrasi). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit merupakan organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan ataupun tugas-tugas memerintah. Dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Pemerintah juga diartikan sebagai kelompok orang secara bersama-sama memikul

tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan (Jum Anggraini, 2012).

Pemerintah di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing Negara dan pemerintahan. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan ke khususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 17 Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Ratnawati & Nasehudin, 2019).

Peran pemerintah daerah diposisikan dalam kegiatan manajemen yang memberikan informasi, pengetahuan serta pendidikan tentang pengelolaan perikanan. Harapannya dalam kelembagaan yang terbentuk untuk mendorong modal sosial nelayan sehingga lebih memiliki kekuatan secara sosial dengan ekonomi yang mandiri. Pembinaan dan pelatihan diperlukan sebagai peran penting pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan yang lebih mandiri yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

## 1. Pemerintah sebagai regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan di bidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

## 2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat (Inu, 2013).

Pemerintah sebagai dinamisator berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat nelayan. Bimbingan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan nelayan. Pengarahan adalah suatu proses pembinaan, memberi petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan (*direction*) juga diartikan keinginan untuk membuat orang lain untuk mengikuti keinginan dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Pengarahan merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam maupun diluar organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran. Sedangkan bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (perorangan atau kelompok) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal guna untuk memahami lingkungan, mengatasi hambatan dalam menentukan rencana masa depan yang lebih baik (Sapriadi, 2018).

### 3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang mengarah pada implementasi pembangunan dalam rangka menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan penyuluh serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat terkait (Inu, 2013).

Salah satu tugas pemerintah sebagai fasilitator adalah penyuluhan. Penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama perikanan agar mereka dapat mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar teknologi, permodalan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya sedangkan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping yang terdiri dari tim penyuluh perikanan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan dan urusan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Perikanan selaku perangkat daerah yang memiliki tanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan khususnya dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan. Peran utama tenaga penyuluh dan pendamping ini adalah sebagai fasilitator bagi masyarakat/kelompok binaan dengan pihak-pihak luar. Selain itu, tenaga penyuluh dan pendamping juga berperan dalam mentransfer pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat/kelompok binaan yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan serta sebagai *problem solution* seputar perikanan serta sebagai mediator antara masyarakat/kelompok binaan dengan pihak-pihak luar termasuk dengan pemerintah daerah.

Pemerintah sebagai fasilitator juga harus dapat menciptakan kondisi yang mengarah pada implementasi pembangunan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas untuk kualitas hidup yang lebih memadai. Selain memberikan pendampingan pemerintah harus dapat memfasilitasi masyarakat dalam pendanaan dan permodalan ataupun pengembangan sarana prasarana. Sarana prasarana salah satu faktor pendukung produktifitas produksi masyarakat, Semakin banyak fasilitas yang dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memudahkan pekerjaannya akan meningkatkan ekektibilitas pemberdayaan dan pendapatan masyarakat. Sehingga salah satu penilaian kesejahteraan masyarakat dapat di lihat pula dalam konteks sarana prasarana yang dimiliki.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi di atas, pemerintah memiliki alat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang dinamakan dengan aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah ialah alat pemerintah untuk menjalankan semua tugas-tugas pemerintahan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dari keempat bentuk peranan pemerintah tersebut di atas dapat terlihat jelas peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan (Lingga, 2011).

#### **D. Nelayan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dan pada pasal 1 butir 5 juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan bukan budidaya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkan.

Nelayan boleh diartikan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan masyarakat nelayan adalah kelompok atau sekelompok orang yang bekerja sebagai nelayan, nelayan kecil, pembudi daya ikan dan pembudi daya ikan kecil yang bertempat tinggal disekitar kawasan nelayan. Nelayan adalah masyarakat yang memiliki mata pencarian utama sebagai penangkap ikan. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Pada hakekatnya nelayan adalah golongan masyarakat yang masih perlu diberdayakan dan harkat hidup mereka perlu diangkat. Pada umumnya kehidupan nelayan selalu diungkapkan dengan keterbelakangan baik dari sudut pandang pencaharian, maupun cara berpikir, dan sikap yang masih tradisional. Dilihat dari lingkungannya kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana fisik di desa-desa nelayan yang pada umumnya masih sangat minim (Salmiah, 2016).

#### **E. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**

Menurut Totok dan Poerwoko (2012:27), istilah pemberdayaan juga dikatakan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya serta aktivitas sosialnya. Menurut Ambar Teguh pemberdayaan dapat dimaknai suatu proses menuju berdaya, atau proses pemberdayaan/ kekuatan/ kemampuan dari

pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan merupakan suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Azhim, 2019).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Tuasamu *et al.*, 2019).

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan untuk keberdayaa kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha dasar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam membangun kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan (Windasai, *et al* 2021). Menurut Tuasamu (2019:145) dalam pemberdayaan masyarakat nelayan harus dengan jalan pemeberian bantuan kebutuhan hidup, bukanlah upaya memecahkan masalah, namun hanyalah bantuan sementara. Pemberdayaan memerlukan sentuhan teknologi karena pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat adalah perubahan sosial untuk memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan suasana sosial budaya dan sosial ekonomi yang ada.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak

bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat adalah bentuk dari upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan serta aktif menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Mustarin *et al.*, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat nelayan dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan ini memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

#### F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mengambil tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang akan penulis lakukan nantinya.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

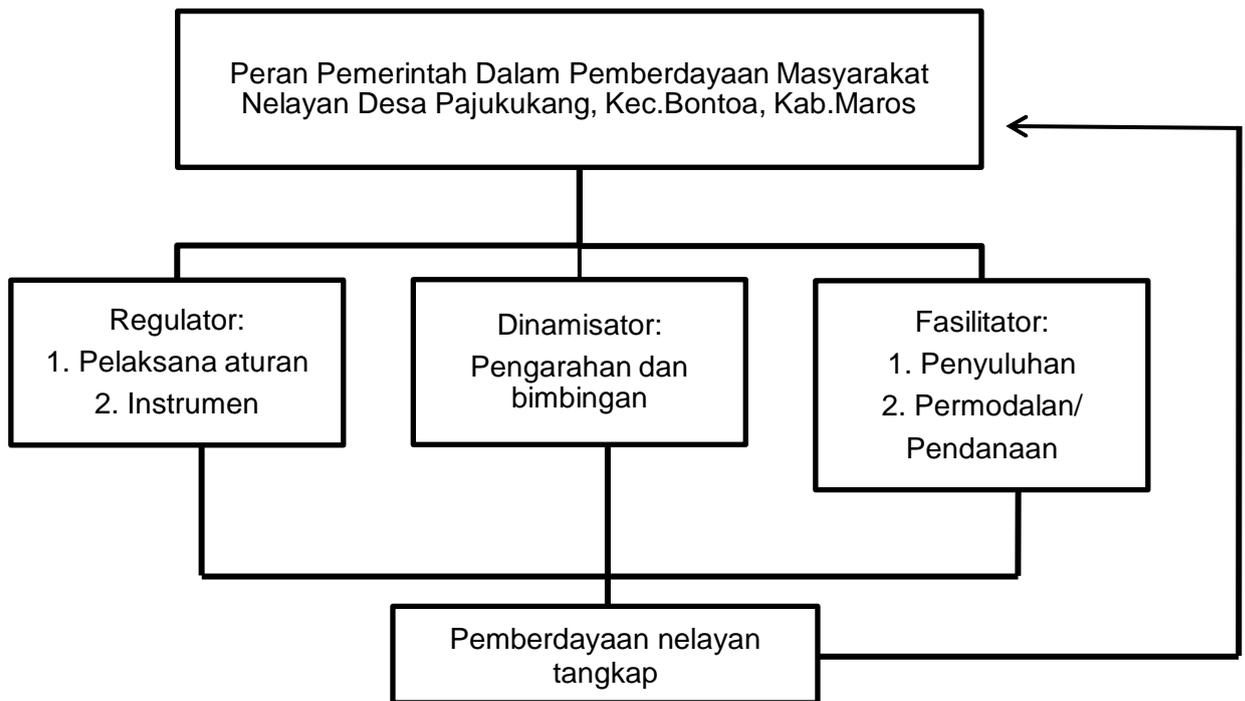
| No | Peneliti                   | Judul   | Metode dan Analisis   | Hasil  |
|----|----------------------------|---|---|--|
| 1  | Farah Dessy Tuasamu (2019) | Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Dusun Mamua Desa Hilla Kecamatan Leihitu | Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk meneliti subjek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. | Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perencanaan orientasi sasaran pemberdayaan masyarakat nelayan sudah sering dilakukan hingga semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini kelompok nelayan sudah dituangkan ke dalam proposal yang diajukan kepada Dinas Perikanan. Tingkat kebutuhan masyarakat nelayan hingga saat ini masyarakat nelayan belum mendapatkan bantuan apapun dari dinas perikanan yang mana bantuan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya. |

Tabel 1. Lanjutan

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| 2 | Windasai, Mohammad Mas'ud Said dan Hayat (2021)               | Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep) | Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus.                        | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat nelayan seperti peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana serta pembentukan kelembagaan nelayan. Namun di masyarakat masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, keterbatasan anggaran, kurangnya teknologi dan transportasi yang memadai. Hal ini menyebabkan pemberdayaan masyarakat nelayan kurang optimal. |
| 3 | Elvira Ramdayanti, Gilli Argenti, dan Prilla Marsingga (2021) | Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang                    | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis melalui Teknik wawancara dan observasi langsung ke lapangan. | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan berdasar kepada Undang-Undang No.7 Tahun 2016. Peran pemerintah juga sudah berjalan dengan baik, dimana masyarakat nelayan diberikan pelatihan, pembinaan, sarana dan prasarana, dan juga asuransi bagi nelayan. Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karawang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya.   |

### G. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir yang digunakan untuk mendukung dan memandu penelitian untuk mengeksplorasi alur skema pemikiran penulis untuk memberikan gambaran tentang struktur pemikiran berbasis penelitian yang membahas masalah penelitian utama, yaitu:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian